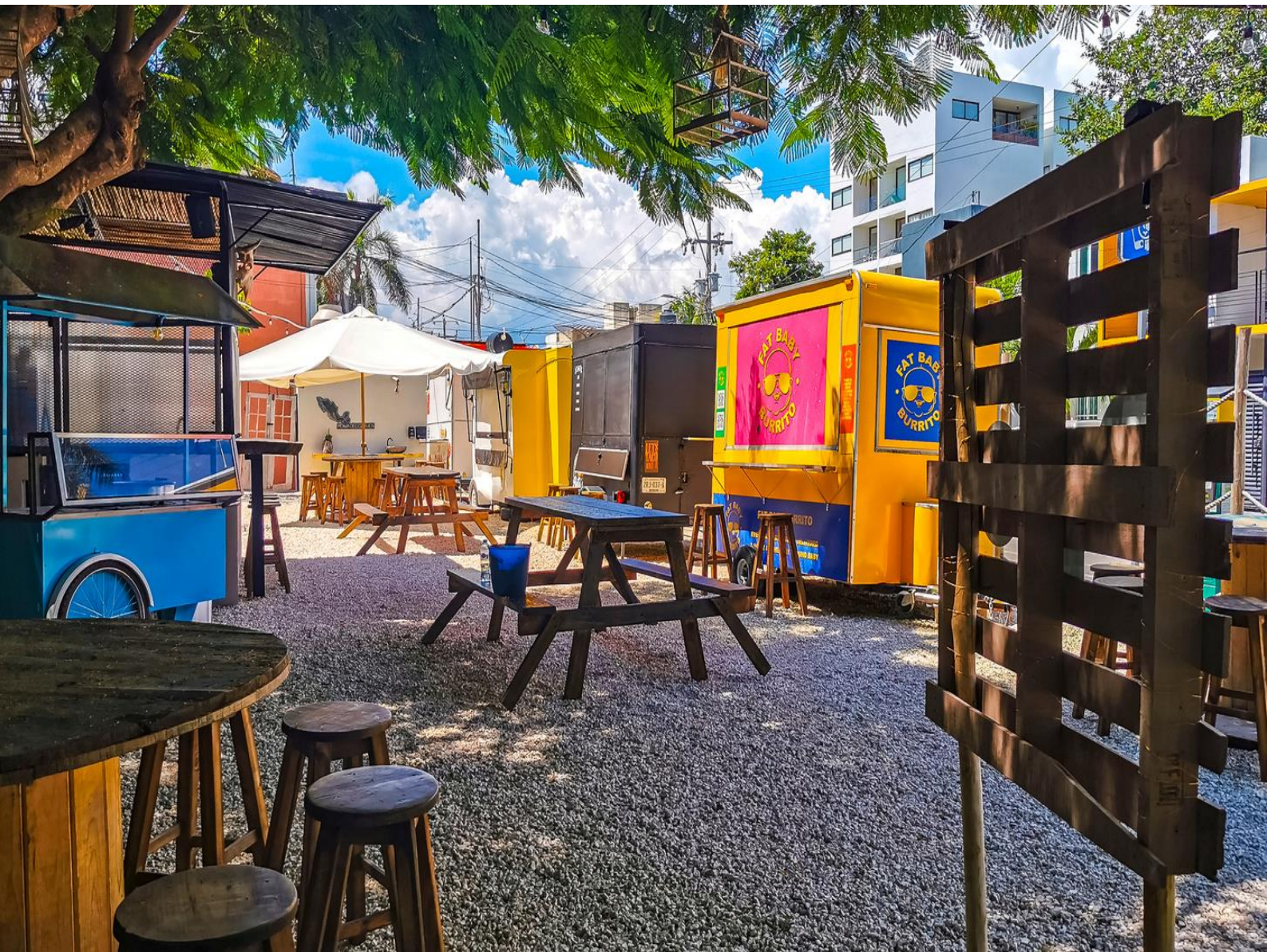


Vol. 1 – Edisi 1

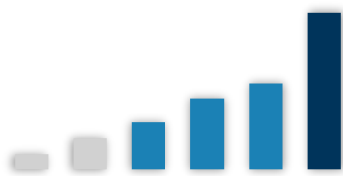
# PDRD LENS



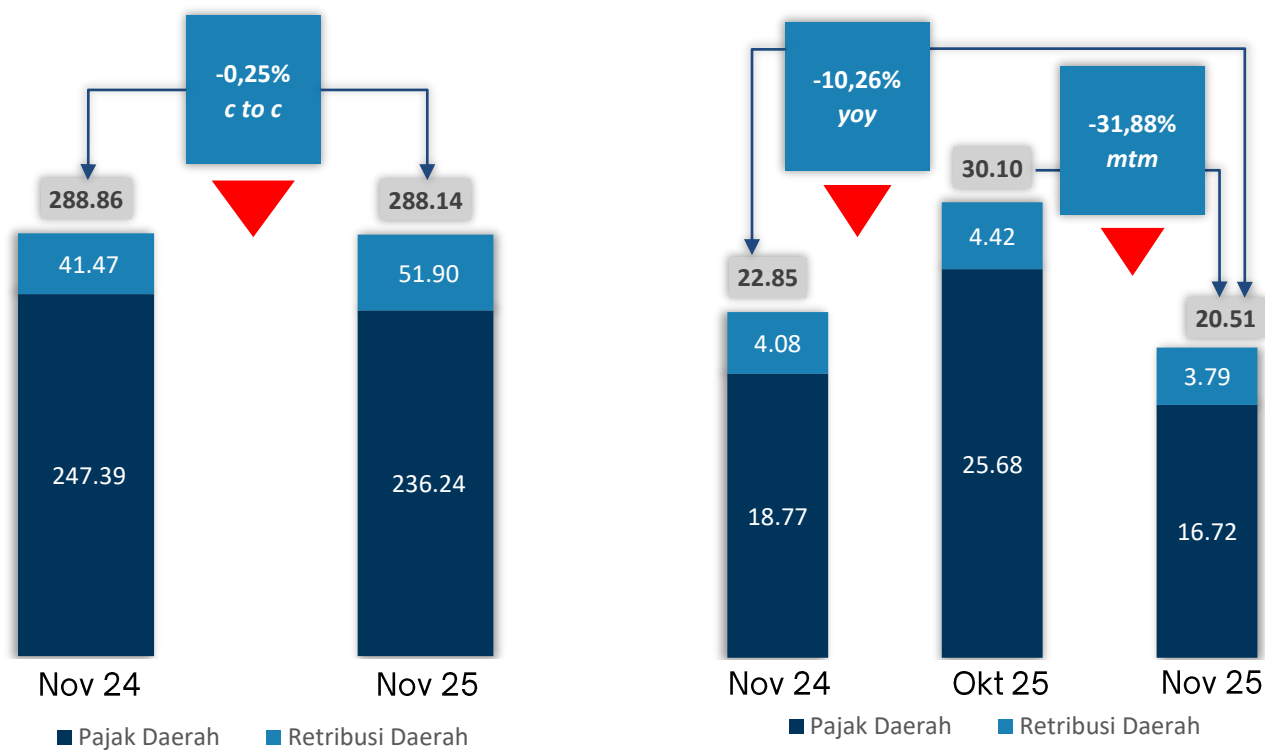
JANUARI  
2025



# PERFORMANCE HIGHLIGHTS



Realisasi PDRD November 2024 – 2025 (Triliun Rupiah)

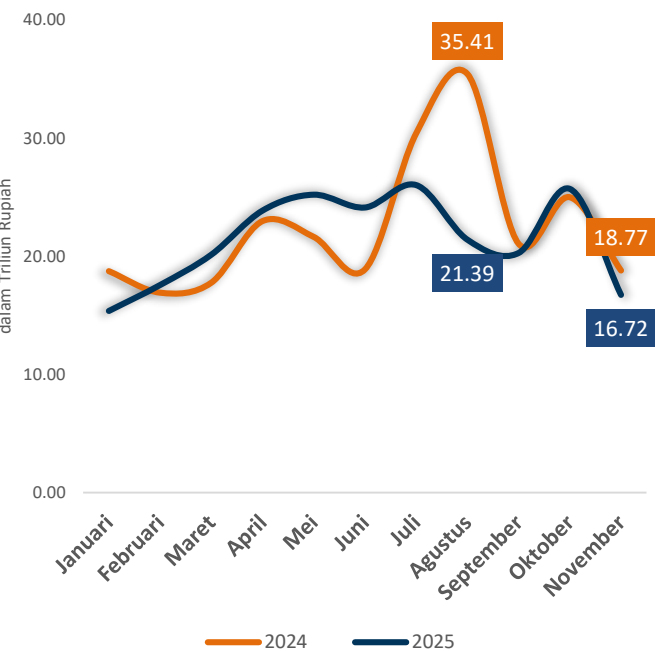


Sumber: SIKD, data per 5 Januari 2026

Kinerja penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada bulan November 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan bulan yang sama pada tahun lalu (yoy) maupun dengan bulan sebelumnya (mtm). Tekanan ini masih berlanjut seperti pada bulan – bulan sebelumnya. Alih-alih menunjukkan tren positif sesuai harapan, intensitas penerimaan di bulan November justru bergerak ke arah sebaliknya. Kontras dengan arah pertumbuhan ekonomi yang persisten, capaian PDRD periode hingga November mengalami kontraksi secara kumulatif sebesar **-0,25**. Kontraksi PDRD tersebut utamanya disebabkan karena menurunnya capaian pajak daerah. Pada November 2025, realisasi pajak daerah mengalami kontraksi sebesar **10,95%** secara yoy, yang berimplikasi pada terkoreksinya pertumbuhan kumulatif (ctc) menjadi **-4,51%**. Sejalan dengan kondisi tersebut, penerimaan retribusi turut mengalami penurunan sebesar **-7,12%** dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu.

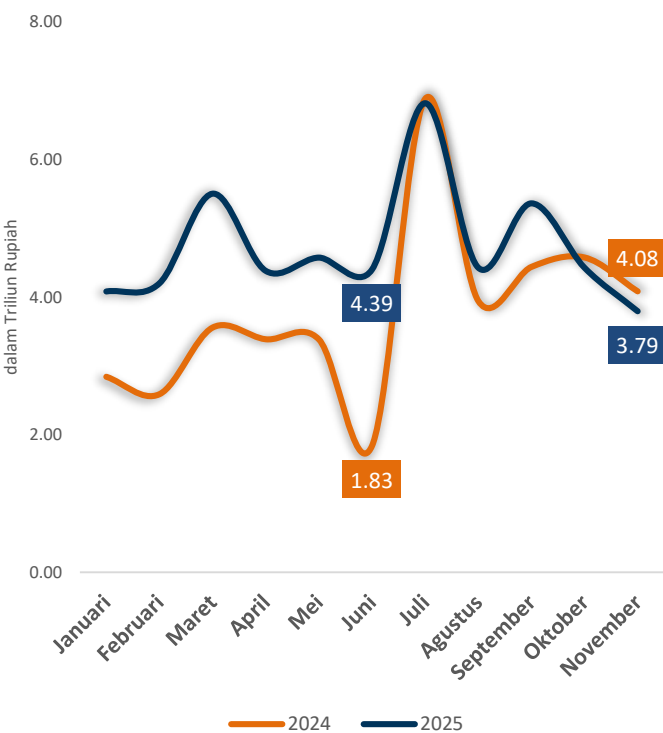


## Pola Realisasi Pajak Daerah Bulanan



Sumber: SIKD, data per 5 Januari 2026

## Pola Realisasi Retribusi Daerah Bulanan



Sumber: SIKD, data per 5 Januari 2026

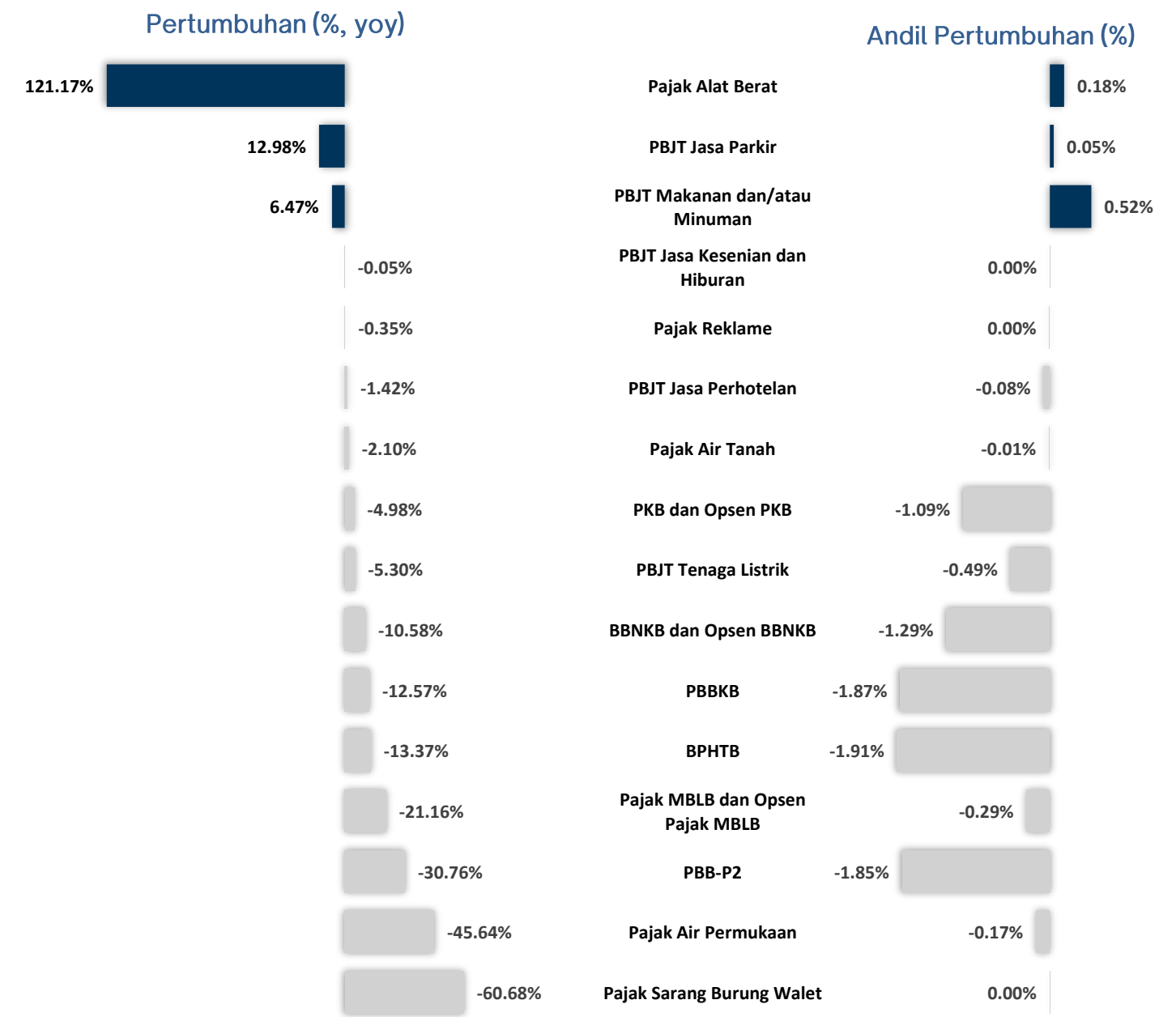
Pola bulanan realisasi PDRD pada tahun 2025 menunjukkan perbedaan yang signifikan jika disandingkan dengan tahun 2024, terutama pada komponen pajak daerah. Hingga bulan November 2025, penerimaan PDRD tercatat memiliki distribusi yang merata. Bulan Agustus yang memiliki intensitas penerimaan pajak daerah yang tinggi justru berkontraksi cukup dalam di tahun 2025 dan selanjutnya pola tersebut terlihat identik hingga bulan November. Hal tersebut yang memicu akumulasi penerimaan pajak hingga November lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Perbedaan pola penerimaan pajak daerah memberikan indikasi awal adanya perubahan kebijakan atau terkait teknis administrasi perpajakan daerah.

Sementara itu, pola penerimaan retribusi daerah tahun 2025 terlihat identik dengan pola di tahun 2024. Intensitas penerimaan terjadi pada bulan Juli. Dalam grafik realisasi PDRD November 2024 – 2025 secara umum terlihat juga penerimaan tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya meskipun dalam 2 bulan terakhir realisasi bulanan 2025 lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Peningkatan penerimaan retribusi ini mengindikasikan adanya perluasan cakupan layanan, baik pada sektor jasa umum, jasa usaha, maupun perizinan tertentu di daerah.



Pada periode November 2025, tercatat hanya tiga jenis pajak yang mengalami pertumbuhan positif, yakni PAB, PBJT Jasa Parkir, serta PBJT Makanan dan/atau Minuman. Sementara jenis pajak lainnya berkontraksi secara yoy. BPHTB, PBBKB dan PBB-P2 berturut – turut memberikan andil yang besar terhadap kontraksi penerimaan pajak bulan November. Pertumbuhan PBJT Makanan dan/atau Minuman mengikuti tren aktivitas sektor penyediaan makan minum yang persisten tumbuh. Sementara itu, efek kontraksi dari penerimaan BPHTB terjadi pada penerimaan BPHTB atas pemindahan hak maupun pemberian hak baru.

Pertumbuhan dan Andil Pertumbuhan Pajak Daerah (yoy)



Sumber: SIKD, data per 5 Januari 2026

# REVENUE DETAIL



## Realisasi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Hingga November 2025 (c to c)

dalam Triliun Rupiah

| Jenis Pajak <sup>1)</sup>       | 2024  | 2025  | Growth (%) | Andil Pertumbuhan (%) |
|---------------------------------|-------|-------|------------|-----------------------|
| PBB-P2                          | 27.03 | 28.30 | 4.69 ▲     | 0.51 ▲                |
| PBJT Makanan dan/atau Minuman   | 15.81 | 16.84 | 6.50 ▲     | 0.42 ▲                |
| PBBKB                           | 31.47 | 31.87 | 1.29 ▲     | 0.16 ▲                |
| Pajak Reklame                   | 2.28  | 2.55  | 11.53 ▲    | 0.11 ▲                |
| Pajak Alat Berat                | 0.28  | 0.48  | 72.67 ▲    | 0.08 ▲                |
| PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan  | 2.17  | 2.34  | 7.58 ▲     | 0.07 ▲                |
| Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB | 2.16  | 2.24  | 3.69 ▲     | 0.03 ▲                |
| Pajak Air Permukaan             | 0.96  | 0.98  | 1.78 ▲     | 0.01 ▲                |
| PBJT Jasa Parkir                | 0.82  | 0.82  | 0.06 ▲     | 0.00 ▲                |
| Pajak Sarang Burung Walet       | 0.01  | 0.01  | -36.16 ▼   | 0.00 ▼                |
| PBJT Tenaga Listrik             | 18.84 | 18.59 | -1.35 ▼    | -0.10 ▼               |
| PBJT Jasa Perhotelan            | 10.37 | 9.93  | -4.22 ▼    | -0.18 ▼               |
| Pajak Air Tanah                 | 1.50  | 0.96  | -36.03 ▼   | -0.22 ▼               |
| PKB dan Opsen PKB               | 54.44 | 53.73 | -1.31 ▼    | -0.29 ▼               |
| BPHTB                           | 25.16 | 23.93 | -4.92 ▼    | -0.50 ▼               |
| Pajak Rokok                     | 17.07 | 15.66 | -8.27 ▼    | -0.57 ▼               |
| BBNKB dan Opsen BBNKB           | 37.02 | 27.04 | -26.96 ▼   | -4.03 ▼               |

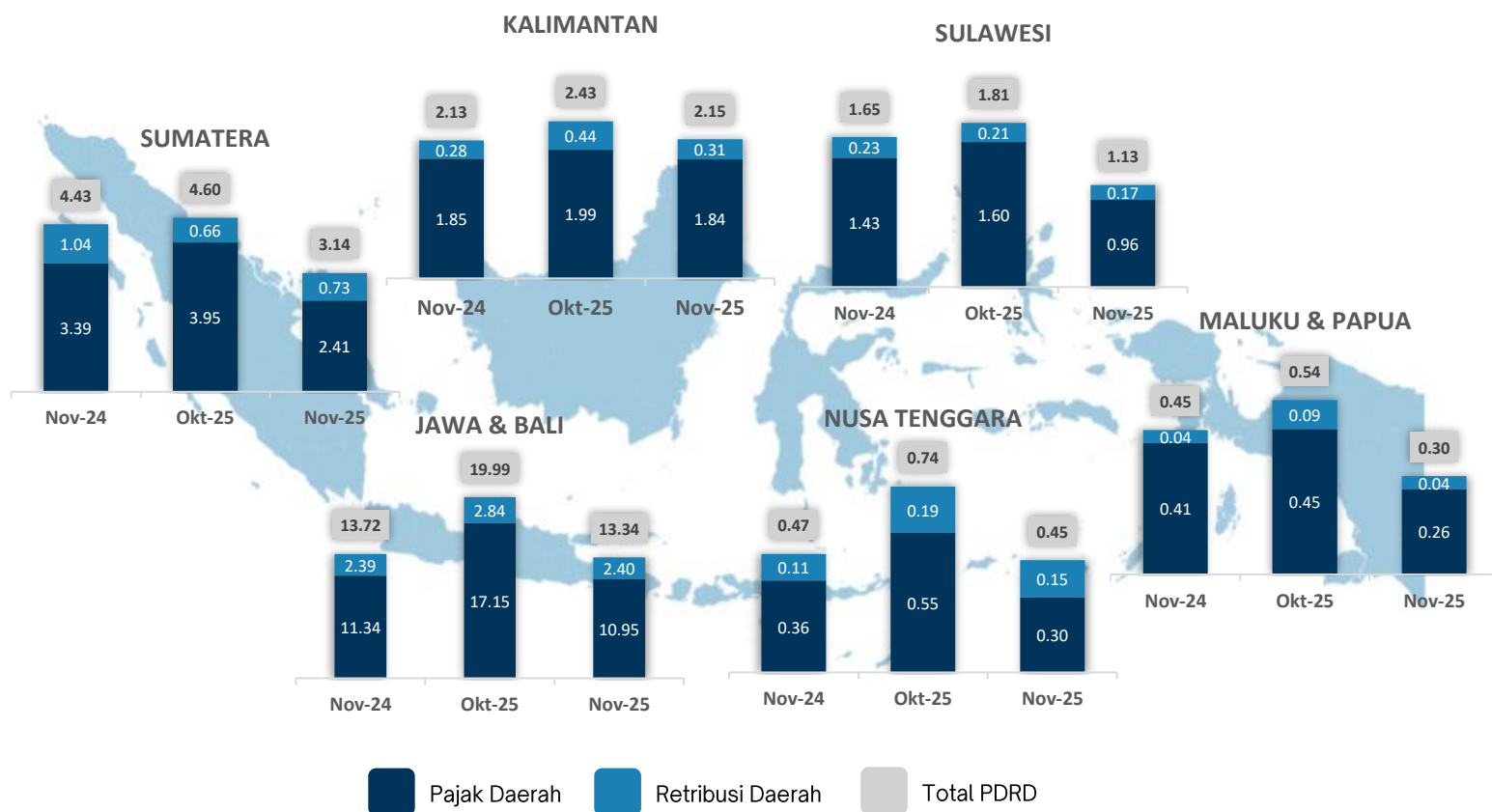
Sumber: SIKD, data per 5 Januari 2026

Pertumbuhan negatif pajak daerah pada bulan November memberikan kontraksi pada penerimaan secara akumulatif dari Januari hingga November 2025. Pertumbuhan positif secara akumulatif sebesar 4,13% yang disumbangkan oleh sembilan jenis pajak tidak cukup kuat untuk meredam tekanan penurunan penerimaan sebesar -8,87% yang dialami oleh delapan jenis pajak lainnya. Hingga November 2025, PBB-P2 memiliki andil tertinggi dalam mendorong pertumbuhan. Dengan kenaikan 4,69% PBB-P2 memiliki andil terhadap pertumbuhan 0,51%. Kendati demikian, penurunan penerimaan BBNKB beserta opsennya tetap memberikan dampak signifikan terhadap kontraksi pajak yang cukup tajam. BBNKB dan Opsen BBNKB memiliki andil yang paling besar terhadap menurunnya kinerja penerimaan pajak daerah hingga -4,03%.

<sup>1)</sup>PBJT: Pajak Barang Jasa Tertentu, PBB P2: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, PBBKB: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, MBLB: Mineral Bukan Logam dan Batuan, PKB: Pajak Kendaraan Bermotor, BPHTB: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, BBNKB: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor



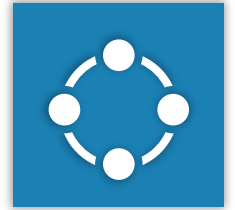
## Pertumbuhan PDRD Spasial (yoy dan mtm)



Sumber: SIKD, data per 5 Januari 2026

Secara spasial, hampir seluruh wilayah mengalami kontraksi penerimaan PDRD pada November 2025. Hanya Kalimantan yang mencatatkan kinerja positif pertumbuhan PDRD yoy. Berbeda jika dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya (*mtm*), maka seluruh wilayah mencatatkan kontraksi penerimaan PDRD. Maluku dan Papua memiliki kontraksi yang paling dalam baik yoy maupun *mtm*. Realisasi yang lebih rendah dibandingkan bulan Oktober disebabkan salah satunya karena penyetoran pajak rokok yang terjadwal secara regular pada bulan Oktober. Dilihat dari kelompok PDRDnya, seluruh wilayah mengalami kontraksi pada penerimaan pajak daerah sedangkan penerimaan retribusi kontraksi terjadi pada wilayah Sumatera, Sulawesi serta Maluku Papua. Sementara di wilayah lainnya justru penerimaan retribusi mencatatkan kinerja positif secara yoy.

# RELATED INDICATORS



Kontraksi penerimaan PDRD yang terjadi hingga November 2025 perlu dicermati apakah disebabkan karena penurunan basis pajak daerah atau karena efek kebijakan dan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, perlu dilihat perkembangan indikator aktivitas ekonomi yang representatif terhadap basis PDRD. Perkembangan beberapa indikator kunci baik makro maupun mikro menjadi sinyal awal melemah atau menguatnya basis PDRD.

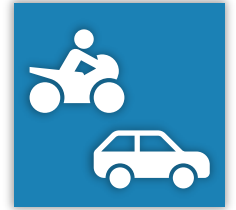
Pada bulan November 2025, terpantau *Prompt Manufacturing Index* (PMI) sebesar 53,3 berada pada zona ekspansi dan lebih ekspansif dibandingkan tahun sebelumnya. PMI menggambarkan aktivitas ekonomi secara makro khususnya aktivitas sektor industri. Walaupun sektor ini bukan merupakan basis utama pajak daerah, keterkaitannya yang erat dengan sektor lain menyebabkan pertumbuhan industri dapat memacu kinerja sektor-sektor yang menjadi basis penerimaan PDRD.



Secara yoy *Retail Sales Index* (RSI) meningkat sebesar 6,3%, yang didukung oleh mayoritas komoditas ritel, kecuali sektor peralatan informasi dan komunikasi, perlengkapan rumah tangga lainnya, dan kebutuhan sandang. Hal ini menunjukkan peningkatan konsumsi masyarakat. Walaupun cakupan komoditas RSI tidak sepenuhnya beririsan dengan basis PDRD, tren positif ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli masyarakat.

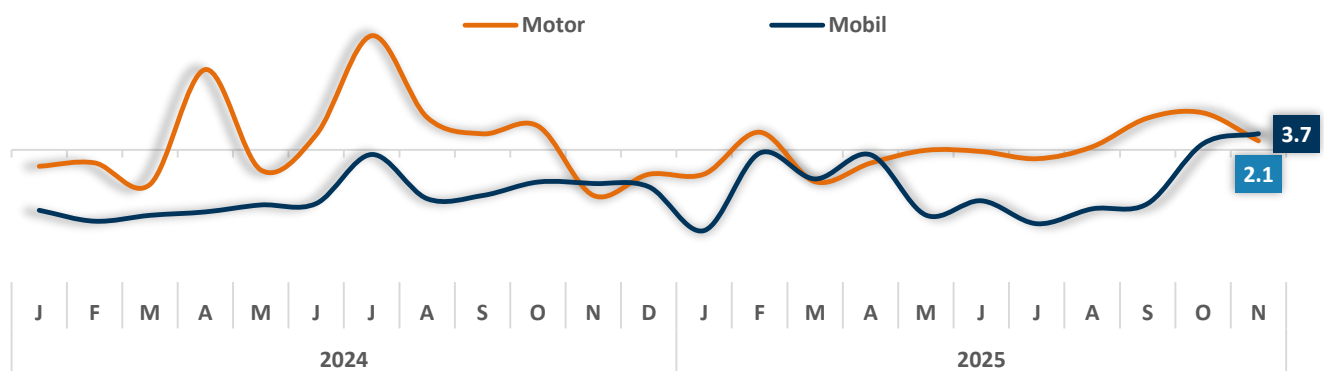


# VEHICLES SALES



Penjualan kendaraan bermotor pada November 2025 mencapai **602,9 ribu unit** yang terdiri dari sepeda motor sebesar **523,6 ribu unit** dan mobil sebesar **79,3 ribu unit** atau secara keseluruhan tumbuh **2,3%** dibandingkan **November tahun sebelumnya**. Pertumbuhan penjualan tersebut mendorong pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor sepanjang tahun 2025. Hingga November 2025, kendaraan bermotor yang terjual sebesar **6,74 juta unit** lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang terjual sebanyak **6,69 juta unit**. Hal ini utamanya disebabkan karena penjualan kendaraan bermotor jenis sepeda motor yang meningkat dari tahun sebelumnya. Sementara penjualan mobil hingga November 2025 turun sebesar **-8,37%**.

**Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Bermotor (% yoy)**



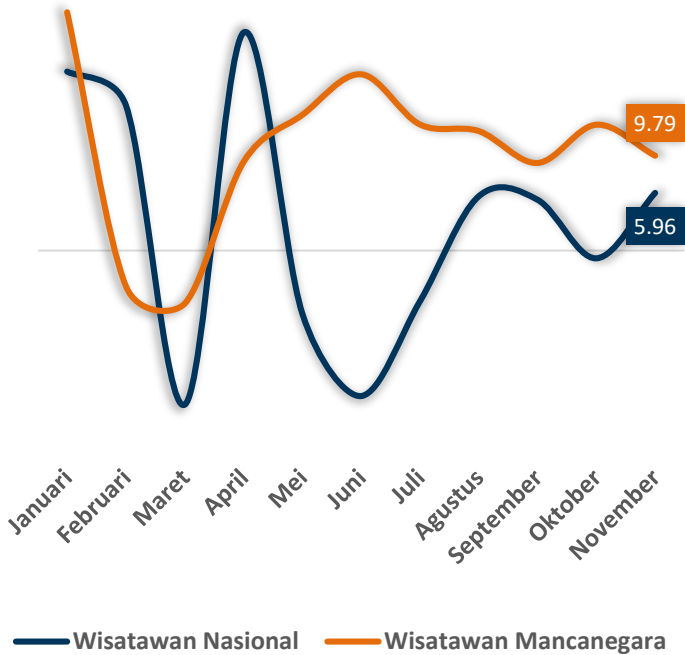
Sumber: Gaikindo dan AISI

Pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor semestinya berpotensi memperluas basis BBNKB dan PKB. Namun, realisasi penerimaan kedua jenis pajak tersebut pada November 2025 justru tetap mengalami kontraksi secara **yoy**. Dari sisi basis pajak, pertumbuhan kendaraan jenis sepeda motor belum mampu mengimbangi kontraksi penjualan kendaraan jenis mobil. Apalagi didalamnya juga termasuk penjualan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang menjadi pengecualian objek PKB dan BBNKB sehingga mengurangi basis pajak daerah. Sementara dalam aspek kebijakan dan administrasi PDRD juga menjadi determinan signifikan penurunan penerimaan pajak tersebut. Peningkatan penjualan kendaraan hingga bulan November ternyata belum mampu mengompensasi kontraksi penerimaan yang timbul akibat kebijakan penghapusan BBNKB untuk kendaraan tangan kedua yang mulai berlaku pada tahun 2025. Di sisi lain, penambahan jumlah kendaraan bermotor sepanjang tahun 2025 juga belum berhasil mendorong penerimaan PKB. Kontraksi pada PKB ini disinyalir terjadi akibat menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak serta dampak penerapan insentif di beberapa wilayah utama.

# TOURISM & HOSPITALITY TREND

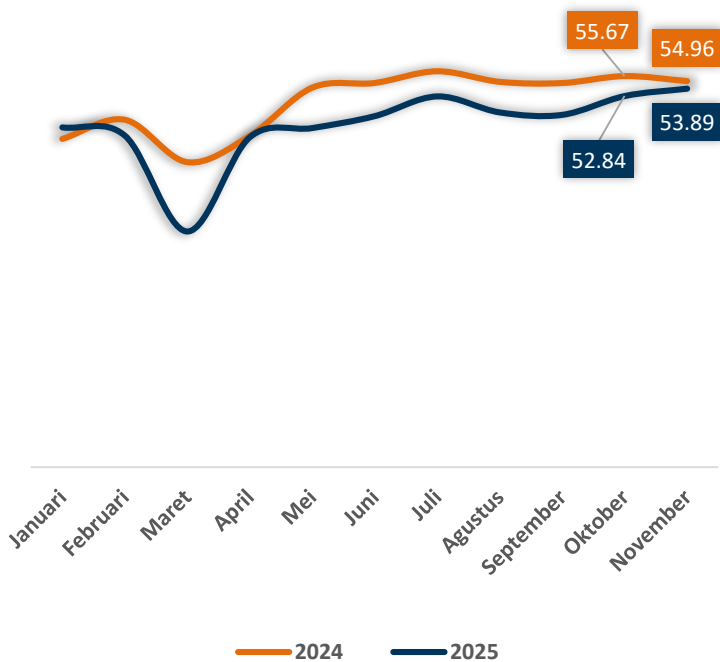


Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)



Sumber: BPS

Hunian Hotel Bintang (%)



Sumber: BPS

Pada sektor pariwisata, volume kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik pada November 2025 mencatatkan pertumbuhan positif secara yoy. Kendati demikian, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya (mtm), jumlah kunjungan tersebut mengalami penurunan tipis. Jumlah wisatawan yang melakukan perjalanan di bulan November mencapai **1,99 juta orang**, yang terdiri dari wisatawan mancanegara sebesar **1,2 juta orang** dan wisatawan nasional mencapai **794,73 ribu orang**.

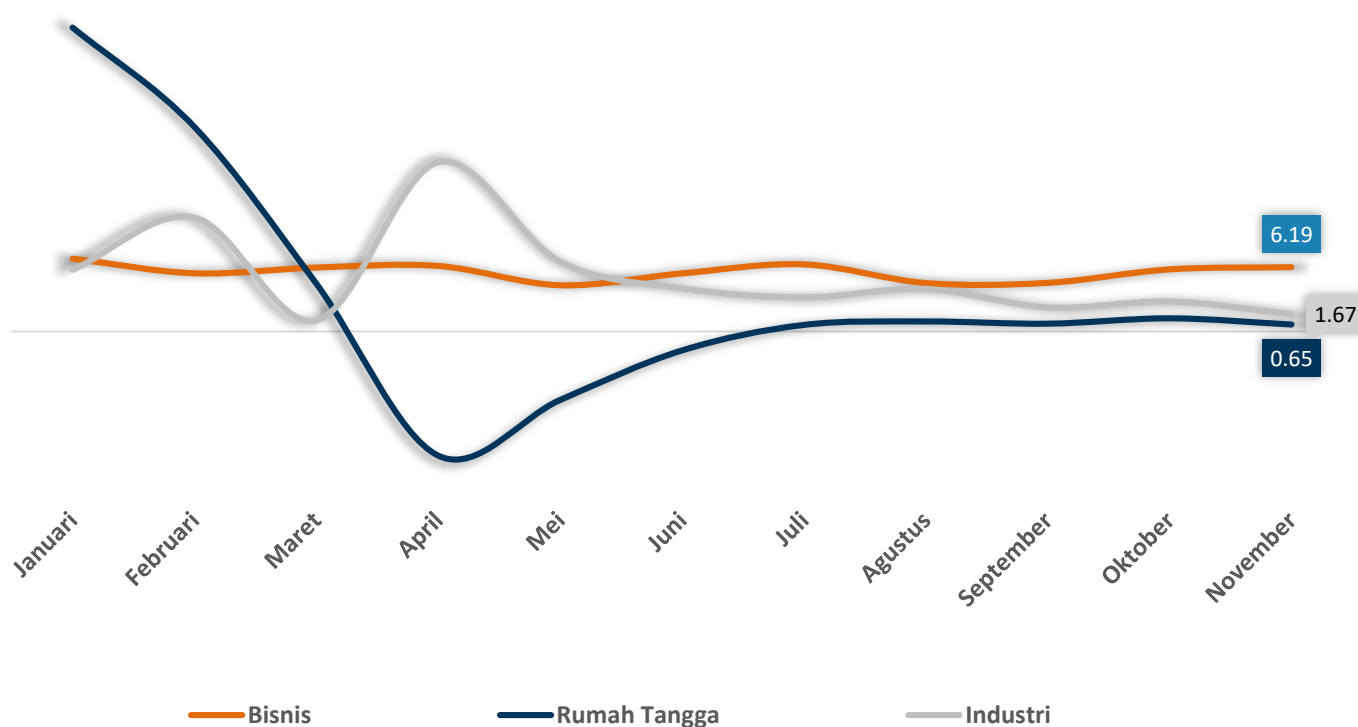
Namun demikian, kenaikan jumlah wisatawan tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat hunian hotel. Hal ini yang terjadi pada sepanjang tahun 2025 dimana hunian hotel berbintang menurun dibanding tahun sebelumnya. Penurunan tingkat hunian hotel berimplikasi langsung terhadap kontraksi penerimaan PBJT Jasa Perhotelan. Fenomena anomali ini disinyalir muncul akibat pergeseran preferensi wisatawan yang beralih menggunakan akomodasi yang tidak terdata dalam sistem perpajakan.

# ENERGY CONSUMPTION



Hingga November, penerimaan PBJT Tenaga Listrik justru berkontraksi di tengah konsumsi listrik yang relatif **meningkat**. Konsumsi listrik merupakan indikator yang merepresentasikan basis PDRD. Tingkat konsumsi listrik memiliki korelasi langsung dengan realisasi penerimaan PBJT Tenaga Listrik. Hingga bulan November, segmen pelanggan bisnis dan industri mencatatkan pertumbuhan yang positif. Sebaliknya, pada segmen pelanggan rumah tangga, tercatat adanya penurunan secara yoy yang terjadi pada periode April hingga Juni. Selebihnya, konsumsi listrik rumah tangga menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun demikian, pertumbuhan konsumsi listrik juga tidak serta merta memicu peningkatan PBJT Tenaga Listrik.

**Pertumbuhan Penjualan Listrik (% yoy)**

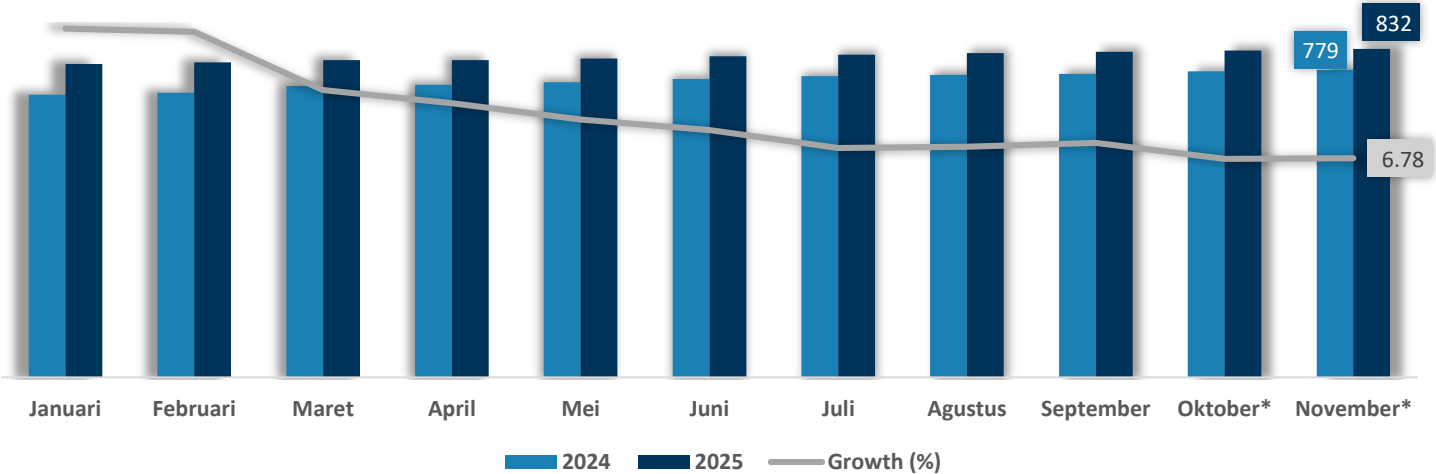


Sumber: PLN



Sektor properti yang merupakan salah satu tulang punggung penerimaan pajak daerah melalui BPHTB dan PBB-P2 menunjukkan tren peningkatan permintaan sepanjang tahun 2025. Hal ini terlihat pada sepanjang tahun 2025 dimana penyaluran kredit untuk properti rumah tangga tumbuh **dias 6%** dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran kredit ini dapat menjadi sinyal awal mengingat **lebih dari 70%** kepemilikan properti rumah tangga dilakukan melalui skema kredit perbankan. Adapun kenaikan kredit properti diikuti juga dengan kenaikan indeks harga properti residensial, hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa sektor properti memang sedang tumbuh.

Penyaluran Kredit Properti (Triliun rupiah)



Sumber: SKKI, Bank Indonesia

Namun demikian, indikasi menggeliatnya properti tidak serta merta mendorong tumbuhnya penerimaan pajak daerah khususnya BPHTB. Artinya, dengan indikasi basis pajak yang tumbuh, terjadinya kontraksi penerimaan BPHTB lebih disebabkan karena pengaruh kebijakan atau administrasi pemungutan. Kebijakan pengecualian objek BPHTB atas rumah sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah turut mempengaruhi realisasi penerimaan. Di sisi lain, penerapan sistem *self-assessment* dapat menjadi faktor yang berpengaruh, karena dapat membuka celah bagi wajib pajak untuk melaporkan nilai transaksi pembelian tanah atau bangunan di bawah harga pasar atau harga transaksi yang sebenarnya, sehingga perlu diiringi penguatan pengawasan

# PENANGGUNG JAWAB

Lydia Kurniawati Christyana

## TIM PENULIS

1. Guruh Panca Nugraha
2. Catur Panggih Pamungkas
3. Ummi Zulianti
4. Satriyo Ari Raharjo
5. Puput Nurhayati
6. Putra Mulia Rahmat
7. Trianto Budi Utama



Diterbitkan Tahun 2026  
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan  
Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta